

Pengaruh Politik Etis Terhadap Bangkitnya Nasionalisme Di Bali Tahun 1914 – 1941

The Influence of Ethical Politics on the Rise of Nationalism in Bali

Dewa Made Alit

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: dewaalit@mahadewa.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi sosial politik masyarakat Bali pada akhir abad XIX, (2) pelaksanaan politik etis di Bali tahun 1914-1941, dan (3) pengaruh politik etis terhadap bangkitnya nasionalisme di Bali tahun 1914 - 1941. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sehingga mengikuti prosedur kerja sejarah yang meliputi heuristik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menemukan: *Pertama*, kondisi sosial politik masyarakat Bali pada akhir abad XIX pada umumnya adalah: (1) struktur pemerintahan di Bali menganut sistem kerajaan, (2) susunan pemerintahan diatur mengikuti saluran hirarkhi, (3) corak dan struktur pemerintah tradisional Bali pada umumnya tidak terdapat perbedaan, (4) hubungan raja dengan rakyat diatur melalui suatu sistem birokrasi tradisional, (5) tata kehidupan para bangsawan tercermin di dalam tata kelakuan, tata kehidupan, lambang-lambang kebangsawanan, dan (6) dilihat dari pelapisan masyarakat di Bali, maka sistem kasta ikut menentukan adanya sistem status di dalam pemerintahan. *Kedua*, politik etis dilaksanakan karena adanya perubahan dalam sistem pemerintahan Belanda yang bisa menjadi tenaga-tenaga yang efisien dalam administrasi pemerintah Belanda. Walaupun kenyataannya pelaksanaan politik Etis menyimpang dari teori dan tujuan semula, karena semuanya disesuaikan dengan kepentingan pihak pemerintah Belanda. Namun dampak yang ditimbulkan adalah membawa perubahan pada sebagian rakyat Indonesia. Akhirnya mempengaruhi pula seluruh kehidupan bangsa Indonesia. *Ketiga*, pengaruh politik etis terhadap bangkitnya nasionalisme di Bali adalah: (1) munculnya golongan terdidik akibat adanya edukasi dari Politik Etis, (2) perluasan pendidikan melahirkan banyak kaum intelektual yang menjadi pelopor dan tenaga penggerak dalam kebangkitan nasional Indonesia, (3) timbulnya pergerakan Nasionalisme Indonesia dari sistem tradisional ke perjuangan dengan mempergunakan organisasi yang modern, dan (4) memberikan kesempatan kepada golongan *Triwangsa* dan golongan *Jaba* untuk mendapatkan pendidikan serta melalui edukasi muncul kaum intelektual yang nantinya sebagai modal dalam pergerakan kebangkitan nasionalisme di daerah Bali.

Kata Kunci : Politik etis, Nasionalisme di Bali

Abstract. This study aims to determine: (1) the socio-political conditions of Balinese society at the end of the nineteenth century, (2) the implementation of ethical politics in Bali in 1914-1941, and (3) the influence of ethical politics on the rise of nationalism in Bali in 1914 - 1941 This research is historical research so that it follows historical work procedures which include heuristics, interpretation and historiography. The results of the study found: First, the socio-political conditions of the Balinese people at the end of the nineteenth century in general were: (1) the government structure in Bali adhered to a royal system, (2) the government structure was arranged according to hierarchical channels, (3) the style and structure of traditional Balinese government in generally there is no difference, (4) the relationship between the king and the people is regulated through a traditional bureaucratic system, (5) the life order of the nobility is reflected in the code of conduct, life order, symbols of nobility, and (6) seen from the layers of

society in Bali , then the caste system also determines the existence of a status system in government. Second, ethical politics was carried out because of changes in the Dutch government system which could become efficient forces in the administration of the Dutch government. Despite the fact that the implementation of the Ethical Policy deviated from the original theory and objectives, because everything was adapted to the interests of the Dutch government. However, the impact caused is to bring change to some Indonesian people. In the end it also affects the whole life of the Indonesian people. Third, the influence of ethical politics on the rise of nationalism in Bali is: (1) the emergence of educated groups as a result of education from the Ethical Politics, (2) the expansion of education gave birth to many intellectuals who became pioneers and driving forces in Indonesia's national awakening, (3) the emergence of movements Indonesian nationalism from a traditional system to struggle by using modern organizations, and (4) providing opportunities for the Triwangsa and Jaba groups to get education and through education intellectuals emerged who would later become capital in the movement for the revival of nationalism in the Bali region.

Keywords: Ethical politics, Nationalism in Bali

PENDAHULUAN

Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nasionalisme bangsa-bangsa lain yang ada di Asia dan Afrika. Kemenangan Jepang atas Rusia menggugah harapan bagi bangsa Asia Afrika, kemenangan atas bangsa Eropa bukan hal mustahil lagi. Harapan itu mendorong semangat bangsa Asia dan Afrika termasuk bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Eropa untuk merdeka (Matroji, 1999: 158). Namun, Indonesia tidak bisa hanya terpaku pada pengaruh kebangkitan bangsa lain, tetapi harus melihatnya juga dari dalam negeri sendiri. Karena bisa saja tumbuhnya nasionalisme itu merupakan reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme atau jika pinjam istilahnya Toynbee yang menyatakan bahwa nasionalisme itu merupakan jawaban bangsa Indonesia terhadap tantangan bangsa barat (Badrika, 1999: 129).

Tumbuh dan berkembangnya jiwa nasionalisme di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pelaksanaan Politik Etis di Indonesia. politik yang digagas oleh seorang Belanda yang berfaham liberal, Conrad Van Deventer. Program politik dari kaum liberal ini hanya untuk

menunjukkan perkembangan bebas perusahaan swasta. Program ini lebih dikenal dengan Trias Van Deventer yang isinya: irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Kalau dilihat dari teorinya, isi dari Trias Van Deventer ini kelihatannya ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, namun kenyataannya semua itu adalah untuk menunjang kepentingan para kaum modal menanamkan modalnya di Indonesia, dan memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia.

Pelaksanaan politik etis di Indonesia, pada masing-masing daerah ada perbedaan dalam menerima pengaruh tersebut. Perbedaan itu di samping disebabkan oleh situasi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu sendiri, juga disebabkan oleh faktor kepentingan dari pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam hubungannya dengan politik kolonial pada waktu itu. Demikian halnya dengan daerah Bali, intervensi Belanda di pulau Bali baru tampak secara keseluruhan setelah kerajaan Klungkung dapat ditaklukkan. Sejak itulah, pemerintah Kolonial Belanda sedikit demi sedikit mengadakan perbaikan-perbaikan serta mulai menanamkan pola-pola pikir secara

Barat di daerah Bali walaupun sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini muncul setelah Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok. Ternyata dari pelaksanaan politik etis ini nantinya menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan rakyat di pulau Bali.

METODE PENELITIAN

Heuristik

Heuristik dilakukan dengan menghimpun suatu jejak-jejak sejarah atau informasi-informasi sejarah. Jejak atau sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tulisan. Sumber tertulis terdiri sumber sekunder yang berasal dari hasil penelitian, buku maupun literatur lainnya yang berkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Kritik Sejarah

Apabila seorang sejarawan telah berhasil menemukan/mengumpulkan jejak-jejak sejarah yang akan menjadi sumber cerita sejarahnya, maka langkah berikutnya yang perlu dikerjakan adalah menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan jejak/ sumber yang benar, dalam arti benar-benar asli (autentik) serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan ceritera sejarah yang ingin disusun. Ini sebenarnya menyangkut kredibilitas dari jejak-jejak tersebut. Usaha ini disebut kritik sejarah (Widja, 1988: 21) baik kritik ekstern maupun kritik intern.

Interpretasi

Fakta-fakta yang telah diperoleh perlu diinterpretasikan sehingga fakta-fakta tersebut dapat dihubungkan secara bermakna dalam keseluruhan cerita sejarah yang hendak disusun. Proses membuat interpretasi sebenarnya proses seleksi, maksudnya adalah memilih fakta-fakta cocok dan utuh untuk dihubungkan

hubungkan guna menghasilkan suatu rangkaian cerita sejarah yang bermakna dari kehidupan masa lampau suatu masyarakat.

Historiografi

Fakta yang sudah ditemukan dan dihubungkan untuk menemukan rangkaian peristiwa kemudian dituangkan dalam historiografi dengan berpedoman pada prinsip serialisasi, kronologi dan kausalitas, sehingga cerita sejarah yang disusun memenuhi kaidah-kaidah penulisan cerita sejarah.

PENYAJIAN HASIL

Kondisi Sosial Politik Masyarakat Bali Pada Akhir Abad XIX

Kondisi sosial politik masyarakat Bali pada akhir abad XIX tercermin dari struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan tradisional sudah sejak lama melandasi sistem pemerintahan di Bali, ini tampak jelas didalam sistem birokrasi tradisional atas daerah kerajaan yang tetap berlangsung sampai abad XIX yaitu saat-saat timbulnya kontak politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Situasi dan kondisi kerajaan tradisional di Bali sekitar tahun 1800 terdiri dari atas tujuh kerajaan. Kerajaan Buleleng, Jembrana, Tabanan, Kerajaan Badung Bangli, , Gianyar (Sardita, 1996: 41 lihat pula Poesponegoro, 1993: 27).

Corak dan struktur pemerintah tradisional Bali pada umumnya tidak ada perbedaan, hanya dalam kebijaksanaan politik pemerintahan sangat ditentukan oleh pribadi seorang raja. Kekuasaan raja sangat besar pengaruhnya, pribadi seorang raja seolah-olah sebagai pemilik kekuasaan tunggal diseluruh daerah kerajaan. Hubungan raja dengan rakyat diatur melalui suatu sistem birokrasi tradisional yang sudah menjadi pola dari sistem pemerintahan yang berlaku diseluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Bali.

Walaupun raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi namun dalam mengambil keputusan, raja didampingi oleh sebuah Dewan Kerajaan atau Pasamuhan Agung, yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan pada raja dalam memecahkan persoalan-persoalan sulit, juga membantu dalam penyusunan undang-undang kerajaan. Pasamuhan Agung juga disertai tugas untuk mengurus hubungan dengan penguasa-penguasa di luar kerajaan (Poesponegoro, 1993: 30).

Tata kehidupan para bangsawan tercermin di dalam tata kelakuan, lambang-lambang kebangsawanan seperti: bentuk rumah, cara berpakaian, bahasa dan sebagainya. Di dalam puri terdapat abdi yang disebut *pengayah sejroning ancak saji*. Di samping itu terdapat juga para abdi yang bekerja diluar puri yang disebut dengan truna manca *jabaning ancak saji* (Poesponegoro, 1993: 29).

Berdasarkan sumber-sumber babad di Bali jabatan patih sudah ada sejak lama. Kedudukan raja dengan patih kadang-kadang sukar dibedakannya. Dilihat dari pelapisan masyarakat di Bali maka sistem kasta ikut menentukan adanya sistem status di dalam pemerintahan yang menjadi golongan penguasa adalah golongan dari kasta ksatriya. Ada juga kasta brahmana yang merupakan kasta tertinggi dengan tugas serta kewajibannya dalam hal adat dan agama, kasta weisya mempunyai tugas dalam bidang pertanian dan perdagangan sedangkan kasta yang keempat yaitu sudra atau juga menyebut dirinya dengan jaba mempunyai tugas dan kewajiban membantu ketiga kasta tersebut di atas (Poesponegoro, 1993: 34). Dilihat dari pelapisan ini maka jabatan patih berada langsung di bawah raja dan dilihat dari keturunan (*genealogisn*) ada kalanya seorang patih itu satu keturunan dengan raja. sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur

pemerintahan tradisional di Bali. Patih selain sebagai panglima perang juga sebagai duta yang berkuasa penuh di dalam menghindari perundingan-perundingan antara kerajaan-kerajaan lainnya di Bali dan terhadap orang-orang asing. Hal ini tercermin pada waktu meletusnya perang Buleleng melawan Belanda (1846), akibat keputusan yang diambil oleh patih I Gusti Ketut Djelantik. Di dalam bidang hukum seorang patih juga ikut mengawasi perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kerajaan misalnya; ikut mengadili perahu-perahu yang melanggar awig-awig paswaran atau pelanggaran terhadap hak tawankarang. Di dalam sistem pengangkatan pada umumnya seorang patih diangkat oleh raja dan dipilih dari orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan raja itu. Di dalam struktur pemerintahan tradisional di Bali kedudukan patih tidak selalu berada di bawah raja, kadang-kadang dapat pula berada sejajar. Jabatan patih kadang-kadang hanya untuk menghindari percekocokan keluarga semata seperti menghindari adanya perang saudara yang sering terjadi akibat dari perebutan tahta kerajaan atau kekuasaan.

Di bawah patih adalah punggawa. Seorang punggawa berkewajiban membantu raja dalam bidang pemerintahan, dan dalam urusan adat serta agama. Dilihat dari sudut *hierarkhi* seorang raja dapat langsung memberikan perintah kepada seorang punggawa demikian pula sebaliknya seorang punggawa bertanggung jawab langsung kepada raja. Hal ini menyebabkan kedudukan punggawa dalam masyarakat tradisional cukup tinggi. Jabatan punggawa pada umumnya diduduki oleh keluarga bangsawan dari kasta ksatriya dan ada kalanya juga dari golongan brahmana. Wewenang punggawa dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur wilayah mendapat kekuasaan penuh dari raja,

terutama dalam hal memutuskan perkara yang berhubungan dengan adat istiadat dan agama (Poesponegoro, 1993: 29). Struktur pemerintahan yang lainnya adalah perbekel. Untuk mengetahui kedudukan serta tugas perbekel selaku kepala desa perlu diketahui tentang bentuk dan susunan desa di Bali. Di Bali sampai sekarang ini masih dapat dibedakan antara desa yang masih bercorak kuno seperti desa Trunyan di Kabupaten Bangli dan beberapa desa yang lainnya.

Politik Etis di Bali tahun 1914-1941

Politik etis timbul akibat dari reaksi yang terjadi atas politik kolonial. Sebelum politik ini dilaksanakan, di negeri Belanda telah terjadi perdebatan-perdebatan antara golongan konservatif dengan kaum liberal dari partai demokrat, mengenai nasib rakyat jajahan. Perdebatan itu pada prinsipnya mereka bersepakat, bahwa tanah jajahan seharusnya memberikan keuntungan kepada negeri induk. Selain itu, pemerintah semestinya mau memperhatikan nasib dan kesejahteraan rakyat jajahan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Colijn "adalah menjadi kewajiban kita untuk mengadabkan orang yang terbelakang". Dan Colijn juga menganggap tugas tersebut sebagai panggilan ilahi dan kesusilaan". (Kartodirdjo, 1990: 31). Kondisi daerah jajahan juga sangat mendukung lahirnya politik etis yakni penderitaan yang dialami rakyat Indonesia yang mencapai puncaknya akibat dari tanam paksa dan politik pintu terbuka. Hal ini sangat menggubah hati kaum sosialis Belanda dari partai demokrat untuk bertindak berdasarkan rasa kemanusiaan. Sedang disisi lain politik kolonial itu justru membawa keuntungan yang berlipat ganda bagi pemerintah dan kaum kapitalis yang menanamkan modalnya di Indonesia. Tidak dapat disangkal, penderitaan yang

diakibatkan oleh pelaksanaan politik pintu terbuka sangat mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Di samping pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harta benda rakyat yang berupa lahan-lahan sawah yang dijadikan areal penanaman tanaman ekspor, juga pemerasan dalam hal tenaga-tenaga rakyat untuk melakukan penanaman tersebut. Sehingga rakyat yang biasa menanam padi untuk keperluan dan kebutuhan sendiri, menjadi tidak bisa memperhatikan kesejahteraannya karena lebih banyak waktunya untuk bekerja pada pemerintah, itu berarti sumber penderitaan.

Kenyataan inilah yang menyebabkan semakin gencarnya tuntutan-tuntutan kaum liberal dari partai sosial demokrat, yang berjuang untuk melancarkan politik kolonial yang konstruktif demi perkembangan Hindia Belanda dan kesejahteraan rakyat jajahan. Orang yang sangat gencar memperjuangkan tuntutan ini adalah Conrad Van Deventer. Ia mengusulkan agar pemerintah Belanda yang telah banyak berutang pada Indonesia yakin hasil-hasil selama politik *batig slot*, karena itu sudah menjadi kewajiban Belanda untuk membayar utang-utangnya itu (Kansil, 1987: 18). Van Deventer berharap supaya Belanda mau membalas budi kepada pihak rakyat Indonesia dan berharap: "Di dalam membayar hutangnya itu, Belanda mau memperlihatkan budi baiknya untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui perbaikan-perbaikan dalam bidang pengairan (irigasi), bidang pendidikan (edukasi), dalam bidang pemindahan penduduk (transmigrasi). Ketiga pokok ini dikenal sebagai Tri Logi Van Deventer" (Kansil, 1987: 18).

Dalam bidang pengairan; di Bali masalah pengairan merupakan masalah penting bagi kerajaan. Pengaturan pengairan untuk tanah persawahan dengan sistem subak menyangkut segi kehidupan

pokok dari rakyat Bali. Di Badung, pengaliran air untuk sawah-sawah di seluruh wilayah tergantung dari lima bendungan besar, yaitu bendungan Kedewatan, Mambal, Praupan, Ongan, yang semuanya ada di Tukad Ayung dan bendungan pusat di Tukad Yeh Pegat. Tiga diantara bendungan-bendungan tersebut terletak di luar batas kerajaan Badung, sebaliknya dua bendungan lainnya yang terletak di dalam wilayah itu, tidaklah hanya mengairi sawah-sawah di wilayah kerajaan Badung saja, tetapi juga mengairi sawah-sawah di wilayah kerajaan-kerajaan Gianyar dan Mengwi. Jelaslah bahwa dalam urusan pengairan diperlukan kerjasama antara satu dengan lainnya. Dalam bidang pemindahan penduduk; untuk di Bali transmigrasi pada waktu itu belum tampak. Tapi hanya beberapa orang yang ikut di dalamnya yang pada dasarnya adalah menjadi pekerja di perkebunan pemerintah Hindia Belanda. Dari program ini masyarakat Bali dapat pula memetik hikmahnya, yakni tahu cara pertanian yang modern, walaupun masih tetap untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.

Dalam bidang pendidikan (edukasi); sistem pendidikan lebih dititik beratkan pada pendidikan tingkat rendah, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai yang sedikit cakap, untuk ditempatkan pada administrasi pegawai dan tenaga administrasi pada perusahaan-perusahaan asing. Untuk hal itu maka mulailah dibuka beberapa sekolah. Pada tahun 1914 di Singaraja dibuka *Hollandsh Inlandsche School* (HIS), pada tahun 1918 dibuka di Denpasar untuk Bali Selatan karena ruangnya tidak mencukupi maka dibuka dua kelas di Klungkung atau di Karangasem. Orang-orang yang dapat masuk HIS sangat terbatas, pada umumnya orang-orang atau anak-anak dari golongan penguasa (raja, punggawa) atau keluarga bangasawan. Berbeda dengan sekolah “Bumi Putra” atau *Inlansche School* dan

sekolah desa, bahwa di HIS anak-anak di samping diajar membaca, menuliskan berhitung, juga diberikan pelajaran bahasa Belanda selain bahasa Melayu.

Bersamaan waktunya dengan pembukaan sekolah-sekolah HIS di beberapa kota di Bali, di Singaraja juga dibuka sebuah sekolah untuk orang-orang Tionghoa yaitu *Holandsch Chineesche School* pada tahun 1914. Pada waktu itu orang-orang Tionghoa sudah cukup banyak bertempat tinggal di Singaraja, sebutan terhadap orang-orang Tionghoa terkenal dengan sebutan *Singkeh*. Mereka sudah sejak lama berperan sebagai pedagang, pada waktu mula pertamanya orang Belanda mendarat di Buleleng, seorang subandar Tionghoa juga berperan sebagai “juru bahasa” antara orang Belanda dengan penguasa daerah. Mengenai orang-orang Timur Asing, setahun setelah ditetapkannya Singaraja sebagai ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok yaitu berdasarkan *staatblad* 1883: 267 ditetapkan Pabean Buleleng, Tumukus dan Sangsit sebagai perkampungan Cina dan Pabean Buleleng sebagai perkampungan orang-orang Timur Asing lainnya.

Pada tahun 1914 juga telah dibuka 13 buah sekolah desa di Bali Utara, 13 buah sekolah Desa (*Dessascholen*) di Bali Selatan dan sebuah di Jembrana. Pada tahun 1916 di Singaraja dapat dibuka *Europeeschool* khusus diperuntukkan bagi anak-anak golongan Belanda. Dari jumlah sekolah-sekolah yang ada di Bali yang masih sangat dirasakan kurang, maka banyak di antara orang-orang tua mulai sadar akan pentingnya pendidikan menyekolahkan anak-anaknya keluar Bali yaitu ke Jawa. Sekitar tahun “dua puluhan” sudah banyak pelajar Bali yang bersekolah di Jawa antara lain di Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Malang, Yogyakarta bahkan ada yang sampai ke Batavia (Jakarta). Sebagai contoh dapat

disebutkan di sini bahwa pada tahun 1919 pada waktu diadakan kongres ke-2 perkumpulan Jong Java di Yogyakarta, telah dimasukkan pula pemuda-pemuda Bali dalam perkumpulan pemuda tersebut. Pelajar-pelajar Bali di samping menuntut ilmu mereka ikut aktif dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda, yang sedang tumbuh di Jawa. Ini menimbulkan kekhawatiran pihak Belanda sehingga mengeluarkan larangan dan membatasi kebebasan pelajar-pelajar Bali melanjutkan ke Jawa. Sejak itu mulailah pelajar-pelajar Bali yang melanjutkan pelajarannya ke Makasar (Ujungpandang).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah kolonial agar pelajar-pelajar Bali tidak lagi melanjutkan atau berhubungan dengan Jawa, Pemerintah Belanda juga mengeluarkan anjuran agar pelajar-pelajar Bali yang telah menamatkan pelajarannya di *Twee & Kiasse School* dan di HIS segera mau bekerja dengan mendapatkan penghasilan yang cukup. Antara tahun 1920-1924 sudah banyak pelajar Bali yang menamatkan pelajarannya di Jawa dan kebanyakan dari mereka bersekolah di sekolah guru (*kweekschool*). Orang-orang inilah kemudian banyak berjasa dalam dunia pendidikan dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan.

Pada tahun 1921 lahir sebuah perkumpulan di bidang pendidikan dan keagamaan di Singaraja dengan nama: *Suita Gama Tirta* yang dipimpin oleh I Gusti Putu Jelantik, anggota pengadilan di Singaraja. Para anggotanya terdiri dari empat golongan kasta dengan tujuan memuliakan agama dengan jalan mempelajari soal-soal agama lewat pembacaan-pembacaan lontar di Bali. Sayangnya perkumpulan ini tidak panjang umurnya dan dari kalangan mereka yang masih haus akan pendidikan kemudian mendirikan perkumpulan dengan nama "Shanti", yang anggota-anggotanya

kebanyakan dan sekeha Jongkok. Perkumpulan "Shanti" ini bergerak dalam bidang pendidikan dengan mengadakan kursus-kursus agama. Dengan segala usahanya perkumpulan "Shanti" ini pada tahun 1923 berhasil mendirikan Sekolah *Perempuan Shanti* dengan mendapat bantuan dan Pemerintahan.

Berkat bantuan-bantuan dari kalangan orang-orang terkemuka dalam masyarakat Bali, perkumpulan dapat mengeluarkan *kalawarta* dengan nama *Shanti Adnyana*. Rupanya para anggota perkumpulan *Shanti* belum ada kesatuan pendapat di antara para anggotanya sehingga *Shanti Adnyana* hanya berdiri satu tahun sedangkan Sekolah Perempuan *Shanti* dapat berdiri sampai tahun 1926.

Perkembangan sekolah-sekolah di Bali antara tahun 1926 sampai tahun 1929 boleh dikatakan masih kurang, *Eumpeesche Lagera School* hanya terdapat di Singaraja sebuah, HIS di Singaraja, Denpasar dan kelungkung masing-masing satu. *Tweede Klasse Scholen*: di Buleleng 8 buah, Badung 5 buah, Jembrana 2 buah, Tabanan 6 buah, Gianyar 3 buah, Klungkung 3 buah dan Karangasem 2 buah. *Volksscholen*: Buleleng 16 buah, Badung 22 buah, Tabanan 22 buah, Gianyar 12 buah, Klungkung 23 buah dan Karangasem 11 buah. Dengan teras kurangnya sekolah-sekolah di Bali, para pelajar Bali banyak yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa, dan sekitar tahun 1927 yang belajar ke Jawa.

Bersamaan dengan gencarnya masyarakat Bali untuk melanjutkan pendidikan, juga dibarengi dengan timbulnya organisasi-organisasi kebangsaan. Setelah putra-putri Bali diberikan kesempatan untuk belajar pada sekolah-sekolah yang ada di Jawa seperti AMS yang pada waktu itu di Bali belum ada, adanya di Blitar, Probolinggo, Yogyakarta, akhirnya pergerakan kebangsaan yang muncul di Jawa dapat

menyebarkan ke Bali. Selanjutnya di Bali mulai bermunculan organisasi-organisasi yang menjadi embrio kebangkitan nasional, dapat dilihat dari lahirnya organisasi-organisasi seperti: "Siti Bali" yang bertujuan memajukan masyarakat Bali dibidang agama, adat istiadat, dan perekonomian. Tumbuhnya perkumpulan ini adalah sebagai reaksi dari propaganda Islam (SI) yang disampaikan oleh HOS Cokroaminoto" (Sardita, 1996: 61). Kebangkitan organisasi tersebut segera diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi lainnya di Bali seperti: "Pada tahun 1921 lahir perkumpulan "Suta Gama Tirta" yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik yang bergerak dibidang agama dan pendidikan dan bertujuan memulyakan agama serta mengubah adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak jaman" (Sardita, 1996: 62).

Pergerakan nasional Indonesia itu mendapat tanggapan yang serius dari rakyat yang tinggal di Bali. Lahirnya berbagai organisasi di Bali juga diwarnai oleh berbagai konflik. Seperti perkumpulan "Bali Adnyana" yang merupakan kelanjutan dari perkumpulan "Shanti" pada tahun 1923 karena mengalami perpecahan yang disebabkan oleh masalah kasta sehingga timbul dua kelompok yang saling bertentangan yaitu golongan triwangsa dan golongan jaba. Golongan triwangsa ingin tetap mempertahankan status yang berdasarkan kasta, sebaliknya golongan jaba menghendaki sistem kasta itu dihapuskan. Dengan demikian dapat diterapkan sistem status menurut *achievement* (Sardita, 1996: 62).

Dari perselisihan paham ini lahirlah perkumpulan "Surya Kanta" pada tahun 1925. Faktor yang mendorong lahirnya perkumpulan ini adalah adanya pengaruh pendidikan dan kondisi sosial pada waktu itu., anggotanya yang lebih banyak dari

kalangan guru bertujuan untuk memajukan pendidikan terutama untuk golongan jaba dan lebih luas lagi untuk memajukan rakyat Bali yang makin keterbelakang di dalam bidang kehidupan serta masih gelap dalam dunia pengetahuan.

Menjelang akhir tahun 1927 rupanya pertentangan antara dua golongan yakni Bali Adnyana dengan Surya Kanta bisa diakhiri karena timbul kesadaran terhadap pentingnya persatuan dimana golongan elite jaba yang bergabung dalam perkumpulan Surya Kanta mempunyai cita-cita jauh lebih maju, dimana dinyatakan dalam tujuannya yakni untuk mengadakan perbaikan memajukan cara berpikir yang kolot agar terbuka dan berkembang mengikuti kemajuan jaman serta berusaha menghapuskan penjajahan di muka bumi ini (Sardita, 1996: 63).

Melihat tujuan perkumpulan ini jelas bahwa wawasan dari perjuangannya sudah menuju pada perjuangan bersifat nasional. Karena bukan hanya bertujuan memperjuangkan masyarakat Bali saja tetapi lebih luas lagi yaitu berusaha menghapuskan penjajahan di muka bumi, seperti apa yang diungkapkan dalam pertemuan umum Surya Kanta pada tanggal 22 Maret 1926 dimana dikatakan:

Bahwa pendidikan jaman kemajuan *natuur* (*paileh jagad*) beberapa bangsa di dunia ini, sekarang ini sedang masing-masing berusaha memajukan negerinya, ada yang sungguh-sungguh hanya mengejar kemajuan pengajaran memperbaiki nasibnya, ekonominya, agar dapat sejajar berdiri dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Ada juga yang mengejar kepandaian dengan

maksud sebagai di atas, sambil bermaksud membuang penindasan bangsa lain sebagai telah umum diketahui orang. Betapa besar hati saudara-saudara kita di tanah Jawa menjemput putra-putranya yang baru datang dari Eropa dengan gelar Master, Doktor, Ingenier, Art dan lain-lain. Siapa kiranya diantara kita penduduk Bali ini yang dapat ketinggalan dari saudara-saudara kita di Jawa (Sardita, 1996: 64).

Semua itu membuktikan kesadaran masyarakat Bali untuk mengikuti jejak-jejak yang telah dilakukan oleh pemuda-pemuda di Jawa yang telah terlebih dahulu mengalami perkembangan ke arah kemajuan. Untuk mencapai kesadaran itu, satu-satunya jalan melalui pendidikan sebab sudah mulai disadari bahwa orang-orang yang berpendidikanlah mempunyai pemikiran maju yang dapat mengerti tentang tuntutan jaman.

Sejak tahun-tahun itulah banyak pemuda-pemuda Bali melanjutkan sekolahnya ke Jawa dengan harapan bahwa setelah mereka tamat, mereka dapat kembali ke Bali untuk memajukan masyarakat Bali yang pada waktu itu sangat dirasakan di Jawa. Sehingga selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan jiwa pemuda-pemuda Bali pada saat itu tidak dibendung dengan isolasi politik Belanda, sebab dia timbul sesuai dengan iklim pergerakan Indonesia. Pertumbuhan benih-benih nasionalisme di Bali senada dengan pertumbuhan-pertumbuhan nasionalisme di Asia khususnya nasionalisme Indonesia dimana pengaruh dan aspek-aspek sosial sangat menentukan. Dengan semakin banyaknya pemuda-pemuda Bali yang melanjutkan sekolahnya ke Jawa, maka rasa persatuan dan kesatuan kebangsaan di kalangan pemuda Indonesia makin kuat dan membulat. Hal ini tidak terlepas dari

usaha para pemuda yang telah menamatkan pelajarannya di Jawa dan kembali ke Bali, seperti I Gusti Putu Kaler yang pada awalnya merupakan anggota perkumpulan Budi Utomo ketika masih ada di Jawa, dan ketika kembali dari Jawa cita-cita perkumpulan Budi Utomo berpengaruh di Bali, terutama sekali muncul dari golongan intelektual yang sebelumnya telah mendapat pendidikan di pulau Jawa.

Cita-cita Budi Utomo yang menuju perbaikan yang harmonis dari bangsa Indonesia terutama sekali melalui pendidikan dan pengajaran, mulai dijalankan di Bali untuk mendirikan sekolah-sekolah yang lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa akibat dari usaha pergerakan di Bali, maka pada tahun 1930 akhirnya berdirilah *Ganesa Study Club* di Denpasar yang dipimpin oleh Purwadi, Nyoman Pegeg dan I Ketut Cetog (Sardita, 1996:65).

Ide dari *Study Club* ini diselaraskan dengan ide yang diambil dari ajaran Budi Utomo itu sendiri. Tahun 1933 juga berdiri suatu Komite Taman Siswa di Denpasar atas prakarsa dari I Gusti Ngurah Pemecutan dalam usaha melanjutkan usaha kaum pergerakan di Bali, terutama sekali dalam lapangan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan pergerakan di Jawa dengan pergerakan yang ada di Bali dapat dikatakan tidak seluas di Jawa, mengingat pendidikan dan pengajaran juga merupakan faktor yang sangat menentukan maju mundurnya suatu ideologi. Kendatipun demikian pergerakan kebangsaan di Bali tetap bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di Bali. Dengan munculnya golongan terpelajar yang memiliki pola perjuangan yang bersifat nasional yang makin banyak. Hal ini rupanya menyebabkan timbulnya kekhawatiran dari pihak Belanda di Bali

terhadap pelajar-pelajar di Bali yang melanjutkan pelajarannya ke Jawa, sehingga mulai timbul berbagai usaha agar pelajar-pelajar Bali jangan sampai banyak yang melanjutkan ke Jawa. Salah satu yang dilakukan pemerintah Belanda adalah membuka kesempatan-kesempatan kerja bagi yang telah menamatkan pelajarannya baik pada *Tweede Klasse School* maupun HIS (Sardita, 1996: 66). Nampaknya pemuda-pemuda Bali tidak bisa ditahan untuk berusaha melanjutkan pendidikannya. Dengan sikap pemerintahan Belanda seperti itu, dikalangan anak-anak Bali yang mulai tumbuh kesadarannya untuk menuntut ilmu pengetahuan akhirnya banyak juga yang melanjutkan ke Makasar (Ujung Pandang) (Sardita, 1996: 65). Dari kenyataan ini semakin nyata kesadaran para pemuda Bali untuk mempersiapkan diri kearah kehidupan yang mandiri dan sejajar dengan bangsa lain, bebas dan merdeka. Demikianlah proses pelaksanaan politik etis di Bali.

Pengaruh Politik Etis Bagi Masyarakat Bali

Perlu mendapatkan perhatian di dalam membicarakan pengaruh politik Pemerintah Hindia Belanda di daerah-daerah Indonesia adalah masing-masing daerah ada perbedaan dalam menerima pengaruh tersebut. "Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada periode waktu artinya ada perbedaan waktu sampai pengaruh itu ke daerah-daerah di Indonesia sehingga perbedaan ini apabila kita telusuri sampai pada apa yang menyebabkan perbedaan itu mengandung permasalahan yang cukup kompleks" (Sardita, 1996: 55). Ini berarti di samping faktor-faktor kondisi dan situasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu. Juga faktor-faktor kepentingan dari pihak pemerintah Hindia Belanda dalam hubungannya dengan politik kolonial pada waktu itu juga ikut

menentukan.

Kembali pada permasalahan di atas bahwa apa yang terjadi di pulau Jawa sekitar tahun 1900 itu sebagai permulaan dijalankannya politik etika oleh pemerintah Hindia Belanda, jika dibandingkan dengan keadaan di Bali akan jauh berbeda. Antara tahun 1846 sampai tahun 1908 di Bali masih berlangsung peperangan menentang penjajahan Belanda, sehingga sampai permulaan tahun 1900 di Bali masing-masing daerah belum semuanya dikuasai Belanda secara keseluruhan.

Intervensi bangsa Belanda di pulau Bali baru tampak sesudah daerah Klungkung dapat ditaklukkan secara keseluruhan dan kemudian menjadikan Singaraja sebagai ibu kota keresidenan Bali dan Lombok. Sejak itulah pemerintah Belanda berdikit-dikit mengadakan perbaikan-perbaikan serta mulai menanamkan pola-pola berpikir secara Barat. Usaha yang pertama adalah melalui bidang pendidikan (Sardita, 1996: 56).

Untuk kepentingan dalam bidang administrasi pemerintah Hindia Belanda berhasil membuka sekolah yang pertama di Bali yaitu *Tweede Klasse School* bertempat di Kota Singaraja. Pada waktu itu pemerintah sangat sulit mendapatkan murid. Salah satu sebab adalah karena dilatar belakang oleh sistem sosial Bali yaitu dengan adanya sistem kasta disamping masih terikat oleh pola-pola pemikiran tradisional.

Oleh karena kebutuhan yang mendesak untuk keperluan tenaga-tenaga administrasi pemerintah dan juga untuk menaikkan derajat orang-orang Bali dalam bidang pendidikan, dalam mengatasi kekurangan murid itu pemerintah kadang-kadang terpaksa dengan jalan paksa. Apa yang tampak dalam perkembangan pendidikan di Singaraja, ternyata: "Pada tahap permulaan golongan Jawa lebih maju

dari pada golongan Triwangsa. Tetapi pada perkembangan kemudian, sejalan dengan politik kolonial Belanda berusaha memisahkan hak-hak Triwangsa dengan golongan Jaba sehingga memperlebar jurang pemisah antara status kedua golongan tersebut” (Sardita, 1996: 57).

Dari uraian tersebut di atas keterbukaan menerima pandangan yang demokratis dari dunia Barat terbatas pada golongan kasta yang terendah yaitu golongan jaba. Dan dengan sistem pendidikan Barat di Bali mulai timbul ide-ide pembaharuan di dalam masyarakat seperti keinginan adanya persamaan hak antara golongan triwangsa dengan golongan jaba.

Pengaruh politik kolonial Belanda dalam memperbaiki tatanan kehidupan di Bali menimbulkan permasalahan dalam status sosial. Usaha pemerintah Belanda untuk mengadakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang modern. Hal ini tampak sekali dalam sistem pengangkatan pegawai negeri, pemerintah Hindia Belanda belum melaksanakan menurut kriteria legal rasional tetapi masih mempergunakan sistem tradisional yaitu menilai seseorang dilihat dari segi tinggi rendahnya kasta (Sardita, 1996: 57). Perbedaan status inilah yang menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat terutama oleh masyarakat Bali Utara. Keadaan seperti ini menimbulkan tuntutan-tuntutan dari sebagian golongan jaba yang sudah terpelajar agar golongan Tri Wangsa mau saling harga-menghargai dan saling hormat - menghormati di dalam pergaulan hidup sesuai dengan tuntutan jaman. Demikian pula tuntutan yang diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu agar pihak pemerintah dapat menilai orang itu yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintahan atau kepala pemerintahan dengan ukuran pendidikan.

Akhirnya dalam bidang

pemerintahan, golongan jaba banyak menerima hambatan-hambatan karena terbatasnya kesempatan yang diberikan, ketatnya persyaratan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Bali. Setelah dibukanya *Eerste Inlandche school* dan kemudian disusul dengan HIS (*Hollandche School*) pada tahun 1914 di Singaraja, dimana kebanyakan murid-murid yang diterima hanya dari kalangan raja-raja, anak bangsawan, dan dari kalangan punggawa (Sardita, 1996: 67). Hal ini menyebabkan banyak anak Bali yang ekonominya kuat bersekolah ke Jawa antara lain banyak yang pergi ke Probolinggo, Surabaya, Yogyakarta, dan ada pula yang melanjutkan sampai ke Batavia (Jakarta). Kebanyakan dari mereka setelah menamatkan pelajarannya setingkat HIS mereka melanjutkan pada sekolah guru dan bekerja dalam lapangan pemerintahan.

P E N U T U P

Kesimpulan

Kondisi sosial politik masyarakat Bali pada akhir abad XIX pada umumnya berbentuk kerajaan, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dibawah raja ada patih, punggawa dan kepala desa yang langsung berhadapan dengan rakyat. Masyarakat terbagi menjadi beberapa golongan yang disebut kasta yakni brahmana, kesatria, wesa dan sudra.

Politik Etis berpengaruh terhadap bangkitnya nasionalisme di Bali karena melahirkan elite baru, elite modern yang lahir melalui proses pendidikan barat. Di samping itu juga tumbuhnya perasaan senasib dari sebagian rakyat Indonesia termasuk di dalamnya Bali akibat dari sistem transmigrasi dari Politik Etis sehingga menumbuhkan rasa ingin bersatu untuk menentang penjajahan, kalahnya Rusia dalam perangnya melawan Jepang, timbulnya Pergerakan Kebangsaan India,

gerakan kebangsaan Filipina, dan berdirinya Republik China; Perluasan pendidikan melahirkan banyak kaum intelektual yang menjadi pelopor dan tenaga penggerak dalam kebangkitan nasional Indonesia. Hal ini menumbuhkan kesadaran tentang ketidakadilan dari perlakuan pemerintah Belanda, sehingga tumbuh keinginan untuk bersatu dalam perjuangan bangsa membebaskan tanah air. Kesemuanya karena dipelopori oleh para kaum intelektual yang terlahir dari adanya Politik Etis. Pada masyarakat Bali juga terjadi migrasi vertikal golongan *Jaba* yang mendapatkan pendidikan barat dapat meningkatkan status sosialnya berdasarkan *achievement status* yang nantinya bersama kaum triwangsa menjadi penggerak kebangkitan nasionalisme di daerah Bali.

DAFTAR RUJUKAN

- Kansil, C.S.T. 1987. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Kartodirjo, Sartono. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Khon, Hans. tt. *Nasionalisme Arti dan Sejarah*.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Notosusanto, Nugroho. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____.1992. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____.1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sardita, I Made. 1996. *Politik Etis dan Pengaruhnya terhadap Bangkitnya Nasionalisme di Daerah Bali*. Tabanan: IKIP Saraswati
- Soekarno. t.t. *Indonesia Menggugat*. Solo: Badan Penerbitan Sasongko.
- Suwondo, Bambang. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional (1900-942) Daerah Bali*. Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah
- Widja, I Gde. 1998. *Pengantar Ilmu Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.